

KONFLIK DAN PERDAMAIAN DI KALIMANTAN BARAT

Pengantar

Provinsi Kalimantan Barat telah digoncang lebih dari sebelas kali kekerasan etnik semenjak tahun 1968. Kekerasan etnik yang paling serius terjadi menjelang dan setelah jatuhnya Jenderal Soeharto dari kursi kepresiden tahun 1998. Pada tahun 1997 dan 1999, kekerasan etnik meledak, menelan korban ribuan jiwa, puluhan ribu manusia terusir dari tempat tinggalnya, ribuan rumah dan lahan pertanian mereka hancur. Umumnya, korban terbesar adalah orang-orang Madura.

Ringkasan laporan ini merupakan hasil analisis mengenai sebab, dampak dan respon terhadap kekerasan etnik yang terjadi di provinsi ini. Hasil analisis ini berguna untuk menyusun program pembangunan yang efektif dalam menciptakan perdamaian antar etnik yang langgeng. Dua metode digunakan dalam menggali informasi: tinjauan kepustakaan (desk review) dan penelitian lapangan (field research). Dua kabupaten dan satu kotamadia dipilih sebagai wilayah penelitian lapangan. Kabupaten Landak, kodia Pontianak dan kabupaten Ketapang berturut-turut dipilih untuk mewakili daerah yang memiliki kapasitas pengelolaan konflik yang rendah, moderat dan tinggi. Sebelum tahun 1997, Landak merupakan bagian dari Kabupaten Pontianak.

Secara umum, komposisi etnik penduduk provinsi Kalimantan Barat terdiri dari Melayu (33,75%), Dayak (33,75%), Tionghoa (10,01%), Jawa (9,41%), Madura (5,51%), Bugis (3,29%), Sunda (1,21%), Malayu Banjar (0,66%), Batak (0,56%) and Lain-lain (1,85%).

Sebab Kekerasan Etnik

Sungguhpun kekerasan etnik di provinsi ini selalu dipicu oleh persoalan sederhana seperti perkelahian antar pemuda Dayak/Melayu dengan Madura, namun sebab-sebab yang mendasarinya sangat kompleks. Ketiga kekerasan etnik tersebut (1997, 1999, 2001) terjadi dalam konteks perkembangan politik yang berbeda.

Kekerasan etnik 1997. Di era Orde Baru, implementasi UU Pokok Agraria tahun 1960, UU Pokok Kehutanan 1967 dan UU Pemerintahan Desa 1979 secara radikal telah merubah lanskap tataguna hutan dan pemerintahan adat (adat governance) di provinsi ini. Undang-undang ini cenderung menguntungkan pemerintah pusat dan perusahaan swasta yang bergerak di sektor kehutanan dan merugikan kepentingan ekonomi penduduk setempat dan lembaga adat terutama adat Dayak.

Menyadari ketimpangan ini, pada tahun 1987, pemerintah pusat memberlakukan keputusan Menteri Dalam Negeri mengenai pemberdayaan lembaga adat. Semenjak itu lahir Majelis atau Dewan Adat yang bertujuan untuk menampung aspirasi dan kepentingan masyarakat adat. Namun dalam kenyataannya, Majelis atau Dewan adat ini cenderung menjadi bagian dari kepentingan perusahaan perkebunan dan partai politik yang berkuasa. Akibatnya, lembaga adat Dayak seperti *Timanggong* gagal menjalankan fungsinya sebagai jembatan mempertemukan kedua kepentingan yang berbeda. Inilah sebabnya kohesi sosial yang terjadi di tingkat komunitas antar suku Dayak, Madura dan Melayu gagal berkembang pada tingkat supra-komuniti.

Kondisi struktural ini mendorong kelompok Dayak terpelajar menggalang gerakan revitalisasi dengan menuntut pemerintah untuk memberlakukan hukum adat dalam pengelolaan hutan dan pemerintahan lokal. Dengan kata lain implementasi kebijakan pemerintah pusat dalam pengelolaan hutan yang bersifat eksklusif (*exclusionary state policy*) telah melahirkan gerakan perlawanan terutama dikalangan masyarakat Dayak.

Di dalam konteks ini, aparat keamanan gagal memberikan rasa aman kepada penduduk setempat. Aparat keamanan telah gagal menangani tindakan kriminal yang sering dilakukan oleh sebagian pemuda Madura terhadap kelompok etnik lain. Pembunuhan dua pemuda Dayak oleh sekelompok pemuda Madura di Sanggau Ledo 1997 terjadi disaat keresahan masyarakat Dayak mencapai puncaknya. Insiden ini memicu pembunuhan dan pengusiran masal suku Madura oleh suku Dayak di kabupaten Pontianak, termasuk Landak, dan kabupaten Sambas.

Sambas 1999. Kekerasan etnik di Sambas 1999, melibatkan Melayu dan Madura serta Dayak dengan Madura, terjadi dalam konteks dua perkembangan yang saling berhubungan. Pertama, respon pemimpin Melayu terhadap semakin menonjolnya identitas Dayak dalam politik lokal. Kedua, peluang memperoleh atau mempertahankan akses politik sejalan dengan akan diberlakukannya UU otonomi daerah. Dalam kurun waktu itu, sejumlah lembaga swadaya masyarakat muncul dengan tujuan memperkuat identitas politik kesukuan.

Sejumlah faktor yang ikut memberi sumbangan terjadinya kekerasan etnik ini adalah sebagai berikut. Pertama, meningkatnya angka kriminalitas yang diyakini dilakukan oleh bagian tertentu kelompok pemuda Madura, dan ketidak mampuan aparat keamanan dalam mengatasi tindak kriminalitas tersebut. Kedua, Tekanan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat Melayu. Tekanan ini disebabkan oleh masuknya pemilik modal besar dalam pengelolaan produksi jeruk dan hasil laut. Ketiga, tekanan kependudukan yang dirasakan oleh masyarakat Melayu akibat membanjirkan migran Madura ke Sambas. Kedua tekanan ini mengakibatkan menciutnya sumber ekonomi mereka. Suku Madura, dipandang oleh suku Melayu sebagai kelompok yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan tradisi lokal,

khususnya dalam kegiatan ekonomi, menjadi target kemarahan mereka. Pandangan ini telah mengubur kohesi sosial di tingkat komunitas antara Melayu dengan Madura yang telah lama hidup di Sambas.

Pontianak 2001. Kerusuhan etnik di kota Pontianak tahun 2001 terjadi dalam konteks dua perkembangan politik: kompetisi antar identitas politik kesukuan dan persoalan mekanisme penyelesaian pengungsi Madura yang hidup di pelbagai kamp di kota Pontianak. Persoalan pengungsi lebih menjadi persoalan pembangunan relokasi (development project) dibandingkan dengan persoalan kemanusiaan (humanitarian aid). Faktor lain yang ikut menyumbang terjadi kerusuhan ini adalah semakin ketatnya kompetisi ekonomi antara Melayu dan Madura.

Dampak

Kekerasan etnik 1997 telah menelan 500 hingga 1700 korban jiwa, umumnya orang Madura. Ratusan rumah dan toko hancur dan ribuan hektar lahan pertanian rusak. Lebih dari 25.000 orang Madura terusir dari tempat tinggalnya dan menjadi pengungsi di sejumlah kabupaten di Kalimantan Barat. Kekerasan ini telah menghentungkan roda ekonomi lebih dari dua bulan. Diperkirakan kerugian mencapai Rp. 13, 56 milyar atau USD 6 juta hanya di tempat pemicu terjadinya kekerasan yaitu Sanggau Ledo.

Kekerasan etnik di Sambas 1999 telah menelan korban jiwa 200 hingga 500 orang Madura. Ribuan rumah milik orang Madura dan ribuan hektar lahan pekarangan dan pertanian miliknya hancur. Orang-orang Madura telah meninggalkan lahan pekarangan dan pertanian miliknya seluas 4495 hektar. Diperkirakan 70.000 orang Madura meninggalkan rumahnya dan menjadi pengungsi di kota dan kabupaten Pontianak dan Sambas. 10.000 orang Madura meninggalkan Kalimantan Barat dan menjadi pengungsi di pulau Madura, Jawa Timur. Pada tahun 1999 orang Madura yang menjadi pengungsi di kota dan kabupaten Pontianak serta kabupaten Sambas berjumlah 68. 934 jiwa atau 12. 472 kepala rumah tangga. Mereka hidup di 26 kamp sementara.

Sungguhpun sulit untuk menilai dampak ekonomi dari kekerasan etnik ini, namun laju pertumbuhan ekonomi provinsi 1999 menunjukkan titik terendah (0,49%) sepanjang era Orba Baru. Rendahnya laju pertumbuhan ini besar kemungkinan disebabkan oleh krisis ekonomi yang sedang Indonesia.

Kerusuhan etnik 2001 di kota Pontianak menelan korban jiwa kurang dari 10 orang Madura. Mereka adalah para pengungsi yang hidup di kamp. Sungguhpun jumlah korban tergolong sedikit, kerusuhan ini memiliki arti politik penting. Politik identitas semakin menonjol di arena publik ibukota Kalimantan Barat. Kerusuhan ini mempercepat pelaksanaan program relokasi permanen di beberapa tempat di kabupaten Pontianak.

Respon

Pemerintah; Pemerintah, termasuk aparat keamanan, di tingkat provinsi dinilai responsif dalam proses evakuasi puluhan ribu orang Madura yang terusir dari Sambas. Namun, banyak kalangan menilai bahwa pemerintah kurang berhasil dalam menangani proses relokasi pengungsi dan pembangunan perdamaian. Kurang berhasilnya pemerintah provinsi dalam menangani program relokasi ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, para pengungsi Madura tidak diikuti sertakan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program relokasi. Kedua, lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintah dalam proses. Masing-masing lembaga memiliki agenda sendiri.

Donor, LSM Internasional dan Lokal; Sejumlah donor dan LSM internasional bekerja sama dengan LSM dan pemerintah setempat cenderung memusatkan perhatian pada usaha pemberdayaan sosial ekonomi pengungsi Madura yang kini hidup di 13 tempat relokasi. Masih sedikit usaha yang telah dilakukan untuk mendorong pembangunan perdamaian antar etnik. Hingga kini, lembaga donor dan LSM internasional telah mengalokasikan dana sebesar USD 2,04 juta dengan perincian USD 1,1 juta untuk pemberdayaan ekonomi, dan USD 949.232.000,- untuk pendidikan anak sekolah dasar.

Disamping kehadiran pelbagai LSM kesukuan, kini telah muncul LSM perempuan yang memiliki misi membangun masyarakat multi-etnik yang sehat. Namun, LSM ini menghadapi tantangan mengingat masyarakat Kalbar tergolong sebagai masyarakat patriarkhi.

Ikrar Perdamaian; Ikrar perdamaian yang diselenggarakan oleh para elit etnik dan pemerintah sering berhasil mengakhiri konflik atau kekerasan etnik. Namun ikrar ini haruslah dipandang sebagai mekanisme pengelolaan krisis (mechanism of crisis management) bukan mekanisme pembangunan perdamaian (peace-building). Ikrar ini tidak dapat mencegah terjadinya kekerasan etnik di masa depan. Karena agenda perdamaian seperti persoalan aplikasi hukum adat, kriminalitas, ketimpangan ekonomi dan pendidikan antar etnik tidak dibahas dalam ikrar tersebut.

Salah satu persoalan mendasar yang hingga kini belum berhasil terpecahkan adalah gagalnya ikrar perdamaian antara Melayu dan Madura. Orang-orang Melayu di Sambas tetap menolak kembalinya orang Madura. Persoalan ini merupakan 'kerikil dalam sepatu' perkembangan kemasyarakatan Kalimantan Barat di masa depan.